

## 1. INFORMASI PROSEDUR

<p><b>PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG</b></p> <p><b>BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b></p> <p>(Sub.Bidang Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi dan Administrasi)</p> <p><b>DASAR HUKUM</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999.</li> <li>Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010).</li> <li>Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008.</li> <li>Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548).</li> <li>Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234).</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenalikan Pangkat PNS (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4193).</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002.</li> <li>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Perpindahan Menjadi Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.</li> </ol>	
--	--

<p>Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.</p> <p>11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.</p> <p>12. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 08 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0810).</p> <p>13. Peraturan Kepala BKN Nomor 13 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002.</p> <p>14. Peraturan Kepala BKN Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003.</p> <p>15. Keputusan Bupati Tangerang Nomor 820/Kep.65-BKD/2001 tentang Pendeklegasian wewenang penetapan alih tugas staf/pelaksana PNS dan Tenaga Harian Lepas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang.</p> <p>16. Keputusan Bupati Tangerang Nomor 814/Kep.65-Huk/2002 Tanggal 11 Februari 2002 tentang Perubahan Status Tenaga Harian Lepas menjadi Tenaga Kontrak Kerja (TKK).</p> <p>17. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 30 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tangerang.</p>	
<p><b>KETERKAITAN</b></p> <p>SOP .....</p>	<p><b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Berkas Surat Permohonan Mutasi Antar Daerah dan Instansi</li> <li>2. Catatan/Pembukuan</li> <li>3. Disposisi Kepala BKPSDM</li> <li>4. Aplikasi Komputer</li> <li>5. Meja Kerja, Printer, ATK dan Telepon</li> <li>6. Kendaraan Dinas</li> </ul>
<p><b>PERINGATAN</b></p> <p>Jika ada perbedaan antara isi surat ini dengan SOP yang ada, maka berlaku SOP.</p>	<p><b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b></p> <p>- Disimpan sebagai data manual dan Komputerisasi.</p>
	<p>TIGARAKSA, Juni 2019</p>

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KABUPATEN TANGERANG

*[Signature]*

TIGARAKSA, Juni 2019

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KABUPATEN TANGERANG

*[Signature]*

H. A. SURYA WIJAYA, S.I.P., M.Si

Pembina Utama Muda  
NIP. 19630611 198503 1 008

**2. URAIAN PROSEDUR ALIH TUGAS ANTAR DAERAH / INSTANSI KE LINGKUNGAN INSTANSI LAIN (Keluar dari Pemerintah Kabupaten Tanggerang)**

No.	AKTIVITAS	PELAKSANA						MUTU BAKU		KETERANGAN	
		Pemohonan SKPD/Instansi	Bupati/Wakil Bupati	Sekretaris Daerah	Kaban	Sekban	Kepala Bidang Mutasi	Staf	Perlengkapan		
1	Menyerahkan Berkas Surat Permohonan Mutasi Antar Daerah/Instansi	↓							Berkas Surat Permohonan Mutasi Antar Daerah/Instansi	10 Menit	Surat Permohonan Mutasi Antar Daerah/Instansi yang telah diterima
2	Menerima Berkas Surat Permohonan Mutasi Antar Daerah/Instansi dan Mendisposisikan ke Sekretaris Daerah.	↓	↓						Surat Permohonan Mutasi Antar Daerah/Instansi yang telah diterima	1 (satu) Hari	Disposisi Bupati dan Surat Permohonan Mutasi Antar Daerah/Instansi
3	Menerima dan membaca Disposisi dari Bupati dan Berkas Surat Permohonan Mutasi Antar Daerah/Instansi dan Mendisposisikan ke Kepala BKPSDM.								Disposisi Bupati dan Surat Permohonan Mutasi Antar Daerah/Instansi	1 (satu) Hari	Disposisi Sekretaris Daerah dan Surat Permohonan Mutasi Mutasi Antar Daerah/Instansi
4	Menerima, membaca Disposisi dan memeriksa Surat Permohonan Mutasi Antar Daerah/Instansi dari Sekretaris Daerah dan Mendisposisikan kembali ke Sekretaris BKPSDM.								Disposisi Sekretaris Daerah dan Surat Permohonan Mutasi Mutasi Antar Daerah/Instansi	1 (satu) Hari	Disposisi Kepala BKPSDM dan Surat Permohonan Mutasi Mutasi Antar Daerah/Instansi
5	Menerima Disposisi Surat Permohonan Mutasi Antar Daerah/Instansi dari Kepala BKPSDM dan mendisposisikan kembali ke Kepala Bidang Mutasi								Disposisi Kepala BKPSDM dan 1 (satu) Hari Surat Permohonan Mutasi Mutasi Antar Daerah/Instansi	1 (satu) Hari	Disposisi Sekretaris BKPSDM dan Surat Permohonan Mutasi Mutasi Antar Daerah/Instansi
6	Menerima dan membaca Disposisi Surat Permohonan Mutasi Antar Daerah/Instansi dari Sekretaris BKPSDM dan Mendisposisikan kembali ke Kepala Sub Bidang Mutasi Pegawai dan Jabatan untuk kemudian diperiksa.								Disposisi Sekretaris BKPSDM dan Surat Permohonan Mutasi Staf/Pelaksana dari SKPD	1 (satu) Hari	Disposisi Kepala Bidang Mutasi dan Surat Permohonan Mutasi Mutasi Staf/Pelaksana dari SKPD
7	Menerima Disposisi dan memeriksa Surat Permohonan Mutasi Antar Daerah/Instansi dari Kepala Bidang Mutasi. Jika dianggap memenuhi syarat disertakan ke staf untuk kemudian dicatat dan membuat laporan evaluasi kebutuhan CPNS ke Bupati berdasarkan kualifikasi pendidikan dan rincian kebutuhan formasi CPNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggerang. Jika ada kekurangan dikembalikan atau di Konfirmasi ke Pemohon Mutasi Antar Daerah/Instansi	Tidak					Ya		Disposisi Kepala Bidang Mutasi dan Surat Permohonan Mutasi Mutasi Antar Daerah/Instansi	1 (satu) Hari	Surat Permohonan Mutasi Mutasi Antar Daerah/Instansi yang telah memenuhi syarat
8	Menerima dan Mencatat Surat Permohonan Mutasi Antar Daerah/Instansi dari pemohon Alih Tugas yang telah memenuhi syarat						↓		Surat Permohonan Mutasi Mutasi Antar Daerah/Instansi yang telah memenuhi syarat	15 Menit	Rekapitulasi Mutasi Antar Daerah/Instansi
9	Menerima surat permohonan Alih Tugas antar Daerah/instansi yang sudah dicatat dan di buatkan laporan permohonan persetujuan/ evaluasi kebutuhan oleh Staf Sub Bidang Mutasi Pegawai, kemudian diserahkan kepada Bupati/Sekda sebagai Bahan Pertimbangan lebih lanjut						↓		Rekapitulasi Usulan Mutasi Mutasi Antar Daerah/Instansi	1 (satu) Hari	Draft jumlah permohonan mutasi Antar Daerah/Instansi mendapatkan pertimbangan/ persetujuan
10	Menerima surat laporan evaluasi kebutuhan CPNS sesuai kebutuhan formasi CPNS dari Kepala BKPSDM sebagai bahan pertimbangan dan menyerahkannya kembali ke BKPSDM untuk kemudian diproses lebih lanjut						↓		Draft jumlah permohonan mutasi Antar Daerah/Instansi mendapatkan pertimbangan/ persetujuan	1 (satu) Hari	Draft jumlah permohonan Mutasi Antar Daerah/Instansi mendapatkan pertimbangan/ persetujuan

11	Menerima surat laporan evaluasi kebutuhan CPNS sesuai kebutuhan formasi CPNS berdasarkan Pertimbangan Bupati/Sekda kemudian memprosesnya dan memerintahkan kepada instansi yang ditetapkan mengikuti wawancara mutasi antar daerah/instansi yang dilakukan melalui SK Kepala BKPSDM, dan membuat surat permohonan kepada Kepala BKPSDM, dan melaksanakan kegiatan wawancara dengan melampirkan Daftar Nominatif permohon Mutasi Antar Daerah/Instansi, surat undangan untuk mengikuti wawancara untuk permohon Alih Tugas, surat Perintah tugas untuk para kepala Biroang di lingkungan BKPSDM untuk melaksanakan wawancara kepada permohon Mutasi Antar Daerah/Instansi , bagi pemohon Mutasi antar Daerah /Instansi dengan jabatan struktural harus mengikuti proses wawancara dengan Sekda	Draft jumlah Permohon Mutasi 2 (dua) Hari wawancara dengan para antar Daerah/Instansi yang telah mendapatkan pertumbangan Bupati/Sekda	Draft jumlah Permohon Mutasi 2 (dua) Hari wawancara dengan para Kepala Bidang di Lingkungan BKPSDM	wawancara dengan para antar Daerah/Instansi yang telah mendapatkan pertumbangan Bupati/Sekda
12	membuat laporan telah melaksanakan kegiatan wawancara mutasi antar daerah/instansi ke Bupati dengan melampirkan nominatif jumlah permohon alih tugas yang telah mengikuti tes wawancara yang di laksanakan oleh para kepala Biroang di lingkungan BKPSDM dan Sekda, menyerahkan kembali ke BKPSDM untuk di proses lebih lanjut atas pertumbangan Bupati/Sekda	Draf jumlah permohon alih tugas mutasi Antar Daerah/Instansi yang telah mengikuti seleksi wawancara dengan para KABID dan Sekda	Draf jumlah permohon alih tugas mutasi Antar Daerah/Instansi yang telah mengikuti seleksi wawancara dengan para KABID dan Sekda	Draft jumlah permohon Mutasi Antara Daerah/Instansi yang telah mengikuti seleksi wawancara dengan para KABID dan Sekda
13	menerima daftar Nominatif mutasi antar daerah yang telah mengikuti wawancara atas pertumbangan Bupati/Sekda untuk ditindak lanjuti, memerintahkan kepada satuan untuk membuat surat persetujuan alih tugas dan mengajukan permohonan kepada Sekda untuk menandatangani i ket konsep surat persetujuan alih tugas bagi pemohon alih tugas yang dipertimbangkan/ tidak dipertimbangkan/	Draf jumlah permohon alih tugas mutasi Antar Daerah/Instansi yang telah mengikuti seleksi wawancara dengan para KABID dan Sekda	Draf jumlah permohon Mutasi Antara Daerah/Instansi yang telah mengikuti seleksi wawancara dengan para KABID dan Sekda	Diterimanya surat persetujuan alih tugas
14	Menerima Daftar Nominatif Mutasi antar daerah/instansi dari Sub Bidang Mutasi Pegawai dan Jabatan Setelah terbit surat persetujuan alih tugas yang telah ditandatangani oleh Sekda kemudian dibagikan atau diserahkan kepada Pemohon alih tugas antar daerah	2 (dua) Hari	2 (dua) Hari	Diterimanya surat persetujuan alih tugas untuk proses lebih lanjut ke daerah/ instansi asal
15	Menerima surat persetujuan alih tugas Mutasi antar daerah dari BKPSDM	10 Menit		



Tigaraksa, 1 Juni 2019

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KABUPATEN TANGERANG

H.A. SURYA WIJAYA, S.I.P., M.Si

Pembina Utama Muda  
NIP.19630611 198503 1 008